



Etnografi Politik Muhammadiyah Sulawesi Selatan dalam Pemilu 2019

Hadisaputra^{1*}

¹Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

*Korespondensi: hadisaputra@unismuh.ac.id

Info Artikel

Diterima 23 Juli
2021

Disetujui 12
Agustus 2021

Dipublikasikan 15
Agustus 2021

Keywords:
Etnografi Politik,
Hubungan Politik
Muhammadiyah,
Muhammadiyah
Sulawesi Selatan,
Pemilihan Umum
2019

© 2021 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya tentang sikap politik Muhammadiyah di era pra kemerdekaan, era Orde Lama, Orde Baru, hingga era pascareformasi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan sikap politik Muhammadiyah Sulawesi Selatan dalam Pemilihan Presiden 2019, Pemilihan Legislatif DPRD dan DPR-RI, serta pemilihan Calon Anggota DPD RI. Studi ini berupaya menemukan model relasi Muhammadiyah dan politik berbasis pengalaman Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan pendekatan studi kasus agar dapat memberi gambaran mendalam tentang topik penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, serta studi dokumen. Selanjutnya tahapan analisis data diawali dengan proses reduksi, kategorisasi, lalu interpretasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif, sikap politik Muhammadiyah dalam berbagai kontestasi relatif sama, yaitu bersikap netral. Namun netralitas itupun memiliki penafsiran beragam, ada netralitas pasif dan aktif. Penafsiran terhadap netralitas terjadi baik pada level Pemilihan Presiden, Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi, DPR RI, maupun DPD RI. Temuan lainnya, berbagai ijtihad model relasi Muhammadiyah dan politik tidak lagi sepenuhnya mengandalkan instruksi atau penafsiran dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Abstract

This study complements previous studies on Muhammadiyah's political attitudes in the pre-independence era, the Old Order era, the New Order, to the New Order era. post-reform era. This study aims to describe the political attitude of Muhammadiyah South Sulawesi in the 2019 Presidential Election, the Legislative Election of DPRD and DPR-RI, as well as the election of Candidates for Members of the DPD RI. This study seeks to find a model of Muhammadiyah relations and politics based on the experience of Muhammadiyah in South Sulawesi. This type of research is qualitative, using a case study approach in order to provide an in-depth overview of the research topic. This study uses three data collection techniques, namely interviews, observation, and document study. The next stage of data analysis begins with the process of reduction, categorization, and then data interpretation. The results of this study indicate that normatively, Muhammadiyah's political stance in various contestations is relatively the same, namely being neutral. But even that neutrality has various interpretations, there is passive and active neutrality. The interpretation of neutrality occurs at the level of the Presidential Election, the Election of Regency/City and Provincial DPRD, DPR RI, and DPD RI.

Another finding is that various ijtihad models of Muhammadiyah relations and politics no longer fully rely on instructions or interpretations from the Central Board of Muhammadiyah.

1. Pendahuluan

Sejak berdiri pada tahun 1912, Persyarikatan Muhammadiyah telah dikenal sebagai gerakan Islam yang bergiat di lapangan dakwah, pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan. Namun sebagai organisasi masyarakat sipil, tidak pernah terlepas dari dinamika politik. Buktinya, Muhammadiyah sering membuat pernyataan politik jelang dan sesudah Pemilu, dalam berbagai forum resmi. Pernyataan tersebut di kalangan Muhammadiyah disebut “Khittah” (Garis Perjuangan). Khittah yang pernah dicetuskan yaitu Khittah Palembang (tahun 1956-1959), Khittah Ponorogo (tahun 1969), Khittah Ujung Pandang (tahun 1971), dan Khittah Denpasar (tahun 2002). Menurut Nashir (2008) Khittah adalah upaya penegasan Muhammadiyah yang tidak bergerak di bidang politik dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan kekuatan politik apa pun di republik ini.

Sebenarnya pertautan antara Muhammadiyah dengan politik dapat ditelusuri antara lain melalui sejumlah studi mengenai Muhammadiyah dan politik sepanjang sejarah pendiriannya, mulai dari kiprah politik Muhammadiyah pra kemerdekaan (Maarif, 1995), era Orde Lama (Syaifullah 1997), Orde Baru (Syamsuddin, 1995; Taba, 1996; Tebba, 1993), hingga pascareformasi (Jurdi, 2010; Qadir dkk., 2015; Sholikin, 2018). Kajian yang lebih spesifik membahas relasi Muhammadiyah dan politik di Sulawesi Selatan, diulas Fatmawati (2014) dan Suratman (2017).

Penelitian ini juga akan mengkaji tentang relasi Muhammadiyah dan politik dengan fokus kajian pada dinamika sikap politik Muhammadiyah Sulawesi Selatan dalam Pemilu 2019. Kajian ini memiliki beberapa kesamaan dengan riset Fatmawati (2014) dan Suratman (2017) yang mengkaji tentang keterlibatan Muhammadiyah Sulawesi Selatan dalam aktivitas politik pasca reformasi. Namun kajian Fatmawati dilakukan dalam kisaran Pemilu 2004, dan lebih fokus memotret respon elit Muhammadiyah atas kehadiran PAN. Studi Suratman difokuskan pada peran elit dalam kemenangan Calon Anggota DPD RI A. M. Iqbal Parewangi dalam Pemilu 2014. Sementara penelitian ini, mengkaji dinamika sikap politik Muhammadiyah dalam Pemilu 2019, baik dalam kaitannya dengan partai politik, pemilihan Anggota DPD maupun Pemilihan Presiden. Letak kebaruan (novelty) riset ini pada sisi waktu (Pemilu 2019) dan dimensi pemilu yang lebih holistik, yaitu Pemilihan Calon Anggota Legislatif, Calon Anggota DPD, dan Pemilihan Presiden.

Upaya menggambarkan dinamika politik Muhammadiyah Sulawesi Selatan secara mendalam itulah yang membuat penulis menggunakan istilah Etnografi Politik. Istilah yang dipinjam dari disiplin ilmu Antropologi dalam membuat penggambaran mendalam seputar masyarakat yang diteliti. Melalui kajian ini penulis berupaya menggambarkan secara mendalam dinamika politik Muhammadiyah Sulawesi Selatan, dan memotret model relasi Muhammadiyah dan politik berbasis pengalaman Muhammadiyah di Sulawesi Selatan.

2. Metode Penelitian

Jenis yang digunakan dalam riset ini merupakan penelitian kualitatif. Penggunaan metode kualitatif ini untuk mengungkap secara mendalam dan teoritis terkait "Etnografi Politik Muhammadiyah Sulawesi Selatan dalam Pemilu 2019". Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, agar mendapatkan data yang lebih komprehensif, rinci, serta mendalam, agar dapat mengkaji fenomena sosial mutakhir (Yin, 1996). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, serta studi dokumen (Creswel, 2016).

Pola wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara tatap muka untuk menghasilkan jawaban rumusan masalah secara mendalam terkait dinamika sikap politik Muhammadiyah Sulawesi Selatan dalam Pemilu 2019. Melalui teknik wawancara, peneliti dapat menelusuri secara mendalam terkait sikap politik Muhammadiyah Sulawesi Selatan, dinamika dalam aktualisasi sikap tersebut, maupun dampak sikap politik tersebut terhadap internal Muhammadiyah maupun bagi masyarakat luas. Informan yang diwawancarai adalah tokoh Muhammadiyah baik pada tingkat Wilayah maupun Daerah, tokoh pemuda/pimpinan organisasi otonom Muhammadiyah yang pernah terlibat sebagai tim sukses pemenangan suksepsi politik yang diikuti tokoh berlatar belakang Muhammadiyah.

Teknik observasi digunakan untuk mengamati perilaku individu-individu atau aktivitas organisasi yang terkait dengan dinamika sikap politik Muhammadiyah dalam Pemilu 2019. Secara operasional, observasi dilakukan dengan menghadiri acara-acara organisasi Muhammadiyah, mengunjungi kantor/ sekretariat Muhammadiyah, atau bersilaturahmi ke rumah tokoh/ aktivis Muhammadiyah. Observasi ini dilakukan untuk melihat langsung situasi, aktivitas, lingkungan dan kehidupan keseharian para pimpinan/ aktivis Muhammadiyah yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian. Observasi juga dapat dilakukan di media sosial, dengan melakukan pengamatan atas aktivitas dan atau pernyataan/ kicauan yang dilontarkan para pimpinan/ aktivis yang terkait dengan dinamika politik.

Studi dokumen digunakan untuk menelaah hasil penelitian, rencana dan laporan kegiatan Muhammadiyah, kebijakan dan keputusan organisasi Muhammadiyah, buku, berita (baik dari media cetak maupun daring), dan opini tentang Muhammadiyah di media massa. Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk melengkapi sekaligus pembandingan hasil observasi dan wawancara.

Pada tahap pengelolaan dan analisis data, peneliti menggunakan enam langkah, yaitu 1) transkrip data; 2) membaca berulang-ulang data; 3) organisasi data, 4) kategorisasi data; 5) mencari data yang sama, 6) menentukan tema-tema data dan melakukan triangulasi data (keabsahan data) terkait dinamika sikap politik Muhammadiyah Sulawesi Selatan dalam Pemilu 2019.

3. Hasil

3.1. Dinamika Muhammadiyah Sulawesi Selatan dalam Pilpres 2019

Menurut peneliti LIPI Ahmad Najib Burhani (Kompas, 25 Januari 2019), pasca reformasi, Persyarikatan Muhammadiyah senantiasa berupaya mempertahankan netralitasnya terhadap politik. Pada era Syafii Ma'arif (periode 1998-2005), diusung slogan "menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik". Kebijakan tersebut

dapat disebut sebagai "netralitas pasif". Pada masa kepemimpinan Din Syamsuddin (periode 2005-2010 dan 2010-2015), Muhammadiyah mengembangkan netralitas aktif, dengan ungkapan "menjaga kedekatan yang sama dengan semua partai politik".

Dalam periode kepemimpinan Haedar Nashir, hubungan Muhammadiyah dengan politik tidak berwujud slogan tertentu. Namun Haedar Nashir menggunakan istilah Muhammadiyah sebagai "jembatan" dalam lanskap politik nasional yang berwatak oposisi biner, bahkan saling menafikan. Dalam pilihan ini, Muhammadiyah harus siap untuk tidak memperoleh 'kue politik', bahkan harus rela, terhimpit hujan dua kubu yang sedang berkontestasi.

Menurut Nashir (2008) cukup banyak dari kalangan internal Muhammadiyah yang berusaha melibatkan persyarikatan dalam arus kepentingan politik. Argumentasinya tampak meyakinkan, jika organisasi Muhammadiyah pasif terhadap politik, maka tidak bakal memperoleh apa-apa, baik keuntungan politik ataupun lainnya. Sebaliknya, jika Muhammadiyah bersifat aktif, maka bakal mendapatkan banyak keuntungan, seperti sokongan dana hingga dukungan kebijakan publik. Karena itu, khittah tidak harus dimaknai pasif, apalagi anti dan negatif terhadap politik.

Bentuk '*netralitas aktif*' secara kelembagaan, ditunjukkan Muhammadiyah dengan mengajukan agenda strategis bagi kedua pasangan Capres-Cawapres dalam Pemilu 2019. Agenda tersebut yaitu, *Pertama*, Agama, Pancasila, ataupun budaya luhur Indonesia seyogyanya tetap dijadikan sebagai basis nilai serta sumber inspirasi dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan negara maupun sebagai kompas moralitas bangsa. *Kedua*, berupaya mengatasi masalah kesenjangan sosial-ekonomi dengan cara progresif, termasuk menerapkan kebijakan yang berani menghadapi segelintir orang yang menguasai hajat ekonomi dan kekayaan bangsa. *Ketiga*, berupaya menegakkan kedaulatan bangsa pada sektor ekonomi, politik, dan budaya, maupun dalam pengelolaan sumberdaya alam. *Keempat*, melakukan reformasi birokrasi yang dengan prinsip *good governance*, dengan menjunjung tinggi meritokrasi tanpa disandera oleh kepentingan politik partisan. *Kelima*, melakukan rekonstruksi terhadap pendidikan dan pengembangan sumberdaya manusia yang merupakan prioritas penting dalam mewujudkan Indonesia unggul, serta berdaya-saing dengan negara maju. *Keenam*, menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang berdaulat dalam melindungi kepentingan nasional, serta menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sebagai kekuatan utama dan strategis di dunia Islam (Muhammadiyah.or.id, diakses 15 Desember 2019).

Meski secara kelembagaan menyatakan diri netral, namun Muhammadiyah memberi kebebasan bagi para anggotanya dalam menentukan sikap politik. Hal itu terjadi di Kabupaten Takalar. Arah dukungan warga Muhammadiyah lebih cenderung mendukung Calon Presiden Prabowo Subianto. Menurut Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Takalar Iqbal Rasyid, kecenderungan warga Muhammadiyah di Takalar ke Capres Prabowo, didasarkan pada kedekatan Capres tersebut dengan ulama.

"Meski tidak ada dukungan secara kelembagaan, namun sinyal yang ditangkap oleh warga Muhammadiyah, dukungan pada aktivitas dakwah

akan lebih kuat jika memilih Prabowo. Apalagi ada hasil Ijtima' Ulama yang menguatkannya" (Wawancara Ikbal Rasyid, 4 Desember 2019).

Kecenderungan warga Muhammadiyah memilih Prabowo Subianto juga terbaca dalam survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dua bulan sebelum Pilpres 2019. Sebaliknya, dalam survei yang sama, dukungan warga NU terhadap Jokowi jauh lebih besar. Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf di basis NU sebesar 64,1%. Angka ini meningkat 8,5% dibandingkan satu bulan sebelumnya. Pada Januari 2019, dukungan NU kepada Jokowi-Ma'ruf tercatat sebesar 55,6%. Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf di basis Muhammadiyah pada Februari 2019 sebesar 33,3% atau turun 8,7% dari hasil survei sebulan sebelumnya sebesar 42% (katadata.co.id, diakses 15 Desember 2019). Survei tersebut akhirnya dilegitimasi hasil *exit poll* litbang Kompas saat hari H Pilpres 2019. Dalam survei yang dilakukan setelah pemilih baru saja keluar dari TPS tersebut, warga yang merasa menjadi bagian dari NU, cenderung menjatuhkan pilihan kepada Jokowi. Sementara itu, pemilih yang memiliki afiliasi dengan organisasi Muhammadiyah, lebih memilih Prabowo (bbc.com, diakses 15 Desember 2019). Dukungan warga Muhammadiyah tersebut juga terlihat dari dukungan personal elit Muhammadiyah, seperti Amien Rais dan Dahnil Anzar. Selain itu, pasangan Prabowo-Sandi juga memperoleh dukungan dari Aliansi Pencerah Indonesia (API). Aliansi ini didirikan eksponen Muhammadiyah dan dipimpin Bendahara Umum PP Muhammadiyah Professor Suyatno. Saat memimpin API, Suyatno dinonaktifkan sementara sebagai Pimpinan Muhammadiyah.

Hasil survei tersebut sejalan dengan kecenderungan sikap warga Muhammadiyah di Sulawesi Selatan yang tergambar dalam percakapan di sejumlah grup *Whats App* yang beranggotakan Pimpinan maupun warga Muhammadiyah. Dalam sejumlah grup aplikasi perpesanan yang juga diikuti peneliti, sejak awal 2019 hingga pelaksanaan Pilpres 2019, postingan tentang Prabowo Subianto sangat mendominasi. Bahkan, anggota grup yang membagikan tautan tentang Jokowi, biasanya akan mendapatkan sindiran, bahkan dirundung (*bullying*) dari sebagian besar anggota grup.

3.1 Dinamika Muhammadiyah Sulawesi Selatan dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019

Secara normatif sikap politik Muhammadiyah dalam Pemilihan Presiden 2019, juga segaris dengan Pemilu legislatif, mulai dari Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi, hingga DPR RI. Pola kebijakan menjaga kedekatan yang sama dengan partai politik menjadi model bagi Muhammadiyah dan warganya dalam menentukan sikap politik di semua tingkatan.

Jika dalam Pemilihan Presiden 2019, tidak ada satupun kader Muhammadiyah yang berkompetisi, dalam Pemilu Legislatif kader Muhammadiyah banyak yang terlibat sebagai kontestan. Kader Muhammadiyah yang berkompetisi tersebar di hampir merata di semua partai politik. Meski secara kelembagaan, Muhammadiyah tidak terlibat dalam memobilisasi dukungan suara bagi kader-kadernya yang terlibat, namun secara personal, pimpinan Muhammadiyah di berbagai tingkatan memberikan sinyalemen, berupa himbauan lisan untuk memilih kader-kader Muhammadiyah.

Dalam Tanwir Muhammadiyah di Bengkulu, Februari 2019, Haedar Nashir menegaskan bahwa Muhammadiyah akan menyiapkan kader yang berminat terjun

ke dunia politik. Harapannya, kader yang dipersiapkan tersebut, dapat membawa aspirasi perjuangan Muhammadiyah ke dalam dunia politik. Kader tersebut akan diarahkan ke berbagai partai politik. Sementara di sisi lain, secara kelembagaan, Muhammadiyah akan tetap berpijak pada sisi netralitas sebagaimana tertuang dalam Khittah Perjuangan Muhammadiyah (fokustempo.co, diakses 15 Desember 2019).

Pernyataan Haedar Nashir sejalan dengan pandangan Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sulsel Andi Iskandar Tompo:

“Kader-kader kita tidak bisa sekadar didorong masuk ke dunia politik tanpa diberikan bekal. Idealnya, kader-kader kita diberikan semacam kursus politik, agar mereka memiliki wawasan dan keterampilan sebelum terjun ke politik. Setelah mereka kita anggap cakap, kita rekomendasikan mereka ke berbagai partai politik. Kelak, merekalah yang diharap menjadi corong Muhammadiyah” (Wawancara Andi Iskandar Tompo, 12 Desember 2019)

Namun Pemilu legislatif yang sistemnya lebih kompleks, membuat pengambilan sikap politik di lapangan juga tidak mudah. Banyaknya kader Muhammadiyah yang berkompetisi, bahkan di partai dan dapil yang sama, membuat peta persaingan sering pula terjadi hanya antar sesama kader Muhammadiyah. Dalam kasus seperti ini, biasanya Pimpinan Muhammadiyah menyerukan ‘asal pilih kader Muhammadiyah, soal siapa, itu pilihan pribadi’. Terkadang pula, ada pertimbangan kader yang jelas trah kaderisasinya, atau kader yang paling jelas sumbangsuhnya bagi persyarikatan.

Sikap Pimpinan Muhammadiyah mulai terbelah, jika Caleg yang merupakan kader Muhammadiyah mencalonkan diri di Parpol yang dianggap tidak dekat dengan Islam, bahkan terkesan menjauhi Islam. Ada satu contoh kasus yang menarik, di media sosial Facebook, pernah beredar foto rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah ke beberapa orang kader untuk dipertimbangkan sebagai Caleg DPR RI melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Warganet, khususnya yang berasal dari kalangan Muhammadiyah, sebagian besar menyangkan rekomendasi tersebut. Hal itu, karena PDIP dianggap sebagai partai pengusung Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Apalagi masih lekat dalam ingatan warganet dari kalangan Islam, Ahok divonis bersalah oleh pengadilan, dalam kasus penistaan agama Islam.

Ternyata, rekomendasi tersebut merupakan bagian dari ‘*affirmative action*’ PP Muhammadiyah terhadap kader-kader muda yang memiliki ketertarikan dengan dunia politik. Berdasarkan informasi dari aktivis Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, rekomendasi serupa juga diberikan kepada kader-kader Muhammadiyah di partai lain, yang membutuhkan surat serupa. Inilah wujud slogan menjaga ‘kedekatan yang sama’ dengan semua kekuatan politik. Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel Andi Iskandar Tompo bisa memahami kebijakan Pimpinan Pusat tersebut, hanya ia menyangkan surat tersebut beredar di ruang publik. Padahal surat tersebut, hanya berfungsi sebagai instrumen ‘lobi elit’, bukan digunakan sebagai pendulang suara (Wawancara, 12 Desember 2019).

Menjaga kedekatan sama kepada semua partai, tidak mudah dilakukan di level kabupaten. Di Takalar misalnya, salah seorang mantan aktivis Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Selatan, agak sulit mendulang

suara dari kalangan warga Muhammadiyah, karena maju sebagai Caleg di partai yang dipimpin oleh pengusaha yang berlatar belakang agama Kristen, Partai Perindo. Partai ini dipimpin Harry Tanoe Soedibyo. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Takalar Ikbal Rasyid menyatakan:

“Sekiranya adinda kita itu maju di PAN atau PKS, saya yakin, ia akan meraih dukungan maksimal dari warga Muhammadiyah di Salaka. Apalagi daerah itu memang basis Muhammadiyah. Pilihan partai juga menentukan potensi dukungan” (Wawancara 4 Desember 2019)

Penjelasan Ketua Muhammadiyah Takalar tersebut menunjukkan masih adanya bias dukungan Pemilihan Presiden terhadap pilihan partai politik. Bahkan ada Pimpinan Muhammadiyah yang terang-terangan menasehati para kader muda Muhammadiyah yang ingin bergelut di bidang politik, “silakan maju dari partai mana saja, asal bukan PDIP, Perindo, dan PSI”. Ketiga partai ini dianggapnya tidak bisa merepresentasikan kepentingan Islam. Padahal, kedua partai yang disebut terakhir, memiliki Sekretaris Jenderal yang berlatar belakang mantan Ketua Umum organisasi otonom Muhammadiyah tingkat pusat. Sekjen Perindo, Ahmad Rofiq, merupakan mantan Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) tingkat Pusat, sedangkan Sekjen PSI, Raja Juli Antoni adalah mantan Ketua Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) Pusat.

Ketua Pemuda Muhammadiyah Takalar Abdullah Hasan menganggap pola relasi Muhammadiyah dan politik yang dibangun Muhammadiyah selama ini sudah cukup ideal. Namun Abdullah berhadapan PP Muhammadiyah memberi diskresi (kebebasan bertindak) dalam pengambilan kebijakan disetiap level Pimpinan, apalagi dunia politik itu sangat dinamis. Ijtihad politik, apalagi dalam pentas politik lokal, biarlah menjadi domain Pimpinan Muhammadiyah di masing-masing tingkatan (Wawancara Abdullah Hasan, 4 Desember 2019). Wakil Ketua Muhammadiyah Sulsel Andi Iskandar Tompo juga berpandangan bahwa momentum politik lokal memang selama ini ditentukan oleh kewenangan Muhammadiyah di setiap tingkatan. Pertimbangan utamanya adalah maslahat dan mudharat bagi kepentingan dakwah Muhammadiyah. (Wawancara, 12 Desember 2019).

3.1. Dinamika Muhammadiyah dalam Pemilihan Calon Anggota DPD RI

Pada masa reformasi, didirikan lembaga baru bernama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Lembaga ini hadir sebagai representasi aspirasi daerah, yang dulu di era Orde Baru diwakili oleh Fraksi Utusan Golongan (FUG) di DPR/ MPR RI. Anggota -anggotanya dipilih dari representasi kelompok masyarakat yang ada di masing-masing daerah. Hanya saja, mekanisme perekrutannya sesuai dengan selera penguasa saat itu. Tak jarang didapati anggota utusan golongan tersebut, diisi oleh keluarga pejabat pusat maupun daerah. Dahulu, inilah manifestasi dari semangat gotong royong, yang menjadi salah satu nilai utama dari Pancasila.

Dalam sistem ketatanegaraan kita, lembaga DPD RI mulai eksis sejak Pemilu tahun 2004. Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat sipil yang memiliki infrastruktur yang merata hingga ke tingkat desa, melihat kehadiran lembaga ini sebagai peluang. Tak heran jika sejak didirikannya lembaga tersebut, Muhammadiyah di tiap wilayah mendorong kader-kader terbaiknya untuk berkompetisi memperebutkan kursi DPD RI.

Di Sulawesi Selatan, semangat serupa juga hadir sejak Pemilu 2004. Menariknya, dinamika tersebut melahirkan kontestasi di internal Muhammadiyah sendiri. Secara resmi, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah saat itu merekomendasi Ketuanya, K. H. Nasruddin Razak sebagai calon anggota DPD mewakili Muhammadiyah. Di sisi lain, Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah juga menerbitkan rekomendasi untuk Nurhayati Azis, salah seorang Wakil Ketua organisasi otonom Muhammadiyah ini, untuk berkompetisi di jalur yang sama. 'Aisyiyah mendorong Nurhayati, karena ia mendapatkan dukungan cukup besar di luar kalangan Muhammadiyah, yakni dari kelompok LSM Perempuan, maupun organisasi pemberdayaan masyarakat.

Kontestasi Nasruddin dan Nurhayati melahirkan perpecahan dukungan di kalangan warga Muhammadiyah. Akibatnya, tak satupun yang berhasil lolos ke Senayan. Nurhayati Azis berhasil meraup suara sebesar 124.770 yang menempatkannya pada posisi ketujuh di antara semua kandidat Calon DPD. Nasruddin Razak hanya berada di urutan ke-25 dengan dukungan sebanyak 57.936 suara.

Kegagalan Pemilu 2004, tak membuat Muhammadiyah Sulawesi Selatan kapok mendorong kembali kadernya maju sebagai calon DPD RI dalam Pemilu 2009. Namun kisah berulang, Muhammadiyah dan Aisyiyah kembali mendorong kandidat yang berbeda. Muhammadiyah merekomendasi Wakil Ketua Muhammadiyah Sulsel Andi Iskandar Tompo, sedangkan 'Aisyiyah kembali mendorong Nurhayati Azis. Muhammadiyah beralasan, pengalaman Andi Iskandar Tompo sebagai mantan legislator DPRD Sulsel maupun DPRD Kota Makassar, dianggap cukup memadai untuk membawa aspirasi Muhammadiyah di DPD. Di lain pihak, 'Aisyiyah beralasan bahwa Nurhayati telah teruji pada Pemilu 2004, dengan perolehan suara yang cukup besar. Ia dianggap memiliki modal suara awal yang cukup besar.

Belum lagi, kehadiran calon yang meski tak mengantongi rekomendasi organisasi, namun memiliki afiliasi kultural dengan Muhammadiyah. Setidaknya saat itu tercatat, ada Iqbal Parewangi (Alumni Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, dan cucu menantu KH. Djamaluddin Amin, mantan Ketua PW Muhammadiyah Sulawesi Selatan), dan Alamsyah Demma (mantan pengurus Pimpinan Wilayah Ikatan Remaja Muhammadiyah). Hasil rekapitulasi suara Pemilu 2009 menunjukkan tak ada satupun yang lolos ke DPD RI. Nurhayati Azis meraup dukungan 120.770 suara, Andi Iskandar Tompo 67.149 suara, Iqbal Parewangi 95.465, dan Alamsyah 63.489 suara.

Belajar dari dua pengalaman itulah, sehingga pada Pemilu 2014, secara kelembagaan, Muhammadiyah tak lagi mengusung Calon Anggota DPD RI. Demikian pula 'Aisyiyah, Nurhayati Azis yang saat itu telah terpilih sebagai Ketua Pimpinan Wilayah pada Musywil 'Aisyiyah di Makassar tahun 2010, lebih memilih berkonsentrasi mengurus organisasi, dibanding berkompetisi kembali di jalur DPD RI. Kekosongan 'calon resmi' inilah yang dijadikan peluang oleh Iqbal Parewangi, yang maju kembali sebagai Calon DPD pada Pemilu 2014. Langkahnya diawali dengan bersilaturahmi ke Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, yang saat itu dipimpin K. H. Alwi Uddin. Gayung bersambut, niat Iqbal diapresiasi Pimpinan Muhammadiyah. Namun, secara organisasi, Muhammadiyah tak mengeluarkan rekomendasi tertulis.

Dalam studi Suratman (2017) terungkap, bahwa meski tak mengantongi dukungan tertulis dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, sejumlah elit organisasi ini cukup giat membantu pencalonan Iqbal Parewangi sebagai Calon Anggota DPD RI. Bahkan kajian tersebut menunjukkan, Ketua PW Muhammadiyah Sulsel saat itu, K. H. Alwi Uddin cukup aktif menyosialisasikan Iqbal ke akar rumput Muhammadiyah. Apalagi saat masa kampanye Pemilu 2014, Muhammadiyah Sulsel juga sedang disibukkan persiapan sebagai tuan rumah Muktamar ke 47 Muhammadiyah tahun 2015. Pada sejumlah pertemuan konsolidasi Muktamar ke daerah-daerah, Iqbal kerap hadir bersosialisasi. Tak jarang, Iqbal berangkat ke daerah bersama rombongan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Dalam penelitian Suratman, setidaknya saat itu ada tiga orang elit Pimpinan Wilayah yang cukup aktif menyosialisasikan Iqbal, yaitu K. H. Alwi Uddin (Ketua), Mawardi Pawangi (Sekretaris) dan Mustari Bosra (Wakil Ketua). Persepsi publik bahwa Iqbal merupakan calon DPD dari Muhammadiyah juga cukup kuat. Iqbal Parewangi (dalam Suratman, 2017) mengakui peran basis suara Muhammadiyah dalam proses pemenangannya. Rekapitulasi hasil Pemilu 2014 menunjukkan Iqbal Parewangi meraup 233.785 suara, dan berhasil lolos sebagai Senator DPD RI masa bakti 2014 - 2019. Lolosnya Iqbal Parewangi disambut suka cita oleh sebagian besar warga Muhammadiyah. Kemenangan tersebut juga kerap dijadikan contoh, bahwa mestinya jika suara Muhammadiyah menyatu, akan lebih mudah mendudukkan kader di DPD.

Jelang Pemilu 2019, sikap politik Muhammadiyah cukup dinamis. Sebelumnya, banyak pihak yang memprediksi Iqbal Parewangi kembali mendapat dukungan Muhammadiyah. Apalagi sejak duduk di DPD RI, setidaknya tergambar dari pemberitaan di berbagai media massa, Iqbal cukup sering menghadiri kegiatan Muhammadiyah baik di tingkat wilayah maupun daerah. Ternyata, Muhammadiyah Sulawesi Selatan lebih memilih mendorong Wakil Ketua PW Muhammadiyah, Syaiful Saleh sebagai Calon DPD dalam Pemilu 2019. Proses pengambilan keputusan ini tidak mudah. Melalui serangkaian pembahasan, baik di internal Pimpinan Wilayah, maupun rapat yang melibatkan organisasi otonom, dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-Sulsel. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, dalam rapat-rapat tersebut, sempat ada beberapa nama yang mengemuka, yaitu Andi Iskandar Tompo, Syaiful Saleh, dan Iqbal Parewangi. Akhirnya mengerucut, dan disepakati nama Syaiful Saleh.

Sebenarnya nama pertama yang mencuat di internal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah adalah Iskandar Tompo. Namun yang bersangkutan menolak dengan alasan umur dan kesehatan, apalagi dengan rangkaian jadwal kampanye yang cukup panjang dan melelahkan. Dua nama lainnya, sempat diusulkan untuk dikompromikan. Salah seorang peserta rapat mengusulkan agar Syaiful Saleh didorong ke DPR RI melalui Partai Amanat Nasional di Dapil Sulsel III, sedangkan Iqbal tetap didorong ke DPD RI. Namun usulan ini ditolak, karena jika terkait dengan Parpol, dianggap bertentangan dengan Khittah, yang memiliki spirit menjaga 'kedekatan yang sama' dengan semua parpol. Wakil Ketua PW Muhammadiyah Andi Iskandar Tompo berpendapat bahwa keterlibatan Muhammadiyah dalam pemilihan DPD tidak termasuk kategori '*politik praktis*', sebab tidak terkait dengan institusi parpol, berbeda jika mengarahkan dukungan ke caleg partai dalam Pileg (Wawancara, 12 Desember 2019).

Dua pilihan terakhir antara Syaiful Saleh dan Iqbal Parewangi tidak lagi diperdebatkan. Semua peserta rapat bulat menyepakati Syaiful Saleh, dengan argumentasi latar belakang kekaderan dan jenjang kepemimpinan di Muhammadiyah yang telah teruji. Apalagi Iqbal Parewangi merupakan petahana, dianggap telah memiliki basis pemilih yang cukup besar di luar Muhammadiyah. Salah seorang kader muda Muhammadiyah mengasosiasikan 'Syaiful Saleh – Iqbal Parewangi' dengan 'Muhadjir Effendy – Anies Baswedan'. Berdasarkan analogi tersebut, warga Muhammadiyah lebih merasa direpresentasikan oleh Muhadjir Effendy di Kabinet Jokowi, dibandingkan dengan Anies Baswedan (saat menjabat Mendikbud). Meski Anies Baswedan memiliki latar belakang keluarga yang secara kultural dekat dengan Muhammadiyah, namun Muhadjir yang merupakan salah satu Ketua di PP Muhammadiyah, dianggap mewakili persyarikatan secara kelembagaan. Karakteristik Syaiful Saleh menyerupai Muhadjir Effendy, sebagai 'kader struktural', sedangkan Iqbal Parewangi disepadankan dengan Anies Baswedan, disebut 'kader kultural'. Pilihan dukungan DPD Muhammadiyah Sulsel ini membenarkan pandangan Burhani (2016), bahwa wajah Muhammadiyah lebih struktural-formalistik, daripada bernuansa kultural. Parameter Kemuhammadiyahan merujuk pada jabatan formal atau keterikatan di Muhammadiyah. Berbeda dengan NU yang lebih lebih bersifat kesamaan tradisi.

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan resmi menyerahkan rekomendasi usungan Calon DPD RI 2019 kepada Syaiful Saleh, dengan menggelar kegiatan Deklarasi dan Konsolidasi Syaiful Saleh di Kampus Universitas Muhammadiyah Parepare, Ahad, 18 Maret 2018. Acara diikuti Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Pimpinan Organisasi Otonom Muhammadiyah, Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah se-Sulawesi Selatan. Rekomendasi tersebut diserahkan oleh Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Prof. Dr. Irwan Akib. Dalam sambutannya, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar ini kembali menegaskan bahwa Syaiful Saleh memiliki kiprah dan pengalaman dalam membesarkan Muhammadiyah di Sulsel. Oleh karena itu, ia menghimbau agar segenap komponen Muhammadiyah berjuang memenangkannya demi harga diri Muhammadiyah. Dalam kesempatan yang sama, dilantik pula Ketua Tim Pemenangan Syaiful Saleh, Mahyuddin Abdullah yang merupakan Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Selatan (Khittah.co, diakses 15 Desember 2019).

Setelah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan memberikan rekomendasi ke Syaiful Saleh sebagai Calon Anggota DPD dari Muhammadiyah, dibentuklah tim pemenangan, yang diberi nama BASIS (Barisan Syaiful Saleh). BASIS dipimpin Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Mahyuddin Abdullah. Struktur tim terdiri dari eksponen Pimpinan Angkatan Muda Muhammadiyah. Selanjutnya, BASIS menggelar konsolidasi ke Pimpinan Daerah, agar dibentuk BASIS di tingkat Kabupaten.

Ketua BASIS Kabupaten Takalar Abdullah Hasan mengungkapkan, setelah BASIS Takalar terbentuk, pihaknya segera melakukan konsolidasi dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Ortom di Takalar. Momentum konsolidasi BASIS Takalar digelar dengan mengundang Syaiful Saleh memberikan orasi kebangsaan di Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Muhammadiyah di gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Takalar pada 1 April 2018. Dalam forum itulah, keluarga besar Muhammadiyah Takalar menyatakan komitmennya untuk

memenangkan Syaiful Saleh. Langkah awal yang dilakukan BASIS Takalar adalah pembentukan tim hingga tingkat kecamatan, dilanjutkan dengan pemasangan atribut kampanye di lokasi-lokasi strategis.

Meski diawali dengan tekad besar, namun dalam pelaksanaannya tidak mudah. BASIS Takalar menghadapi kendala logistik kampanye. Konsolidasi yang dilakukan BASIS Takalar lebih banyak dilakukan dalam bentuk komunikasi menggunakan alat telekomunikasi, seperti telepon, dan pemanfaatan aplikasi perpesanan Whats App, khususnya melalui grup-grup Muhammadiyah maupun organisasi otonomnya. Konsolidasi pemenangan BASIS lebih banyak dilakukan di dunia maya. Strategi ini ditempuh untuk menyiasati keterbatasan logistik pembiayaan kampanye tatap muka. Calon DPD yang menjadi saingan utama Syaiful Saleh di Takalar adalah Sindawa Tarang dan Tamsil Linrung. Sindawa Tarang merupakan Calon DPD putra daerah Takalar, sedangkan Tamsil Linrung adalah dedengkot PKS, yang merupakan ‘teman separtai’ dengan Bupati Takalar Syamsari Kitta saat itu. Ketua BASIS Takalar Abdullah Hasan mengungkapkan:

Kendala utama yang kami hadapi adalah keterbatasan logistik. Alat peraga seperti baliho dan spanduk terbatas, yang cukup banyak itu kartu nama. Tim kami di lapangan hanya bermodalkan kartu nama, sementara calon lain menyapa warga dengan sarung atau program. Meski demikian, modal sosial yang dimiliki para kader Muhammadiyah itulah yang kami maksimalkan (Wawancara, 4 Desember 2019).

Ketua Muhammadiyah Takalar Iqbal Rasyid tidak menampik keterbatasan logistik yang dihadapi dalam menyosialisasikan Syaiful Saleh. Bahkan dirinya sempat diminta Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sulsel Ahmad Tawalla agar mengoptimalkan alat peraga khususnya di jalan poros. Berbeda dengan kandidat lain, misalnya Tamsil Linrung, yang banyak menempatkan program-programnya sebagai Anggota Komisi VII DPR RI di Kabupaten Takalar. Namun Syaiful Saleh juga memiliki kelebihan khusus di Takalar, selain basis Muhammadiyah, Syaiful Saleh juga dikenal akrab oleh para penyuluh pertanian di Takalar. Sebab, di masa mudanya, Syaiful sempat bertugas sebagai pegawai Dinas Pertanian di sana.

Kendala lain yang dihadapi BASIS dalam menyosialisasikan Syaiful Saleh adalah gesekan dengan pendukung Iqbal Parewangi di akar rumput. Meski Syaiful Saleh mengantongi rekomendasi resmi, sejumlah kader Muhammadiyah masih tetap menyatakan dukungan terbuka ke Iqbal Parewangi. Bahkan Iqbal mengklaim mengantongi kurang lebih tiga ribu KTP dukungan yang berasal dari warga Muhammadiyah dan Aisyiyah di Makassar, saat mendaftar ke KPU, 26 April 2018 (Sulselsatu.com, diakses 15 Desember 2019).

Padahal, diketahui Muhammadiyah telah merekomendasikan Syaiful Saleh untuk ikut maju di DPD RI. Perdebatan yang beredar di kalangan kader Muhammadiyah berkisar pada perbandingan level kekaderan antara Syaiful Saleh dan Iqbal Parewangi. Meski Iqbal tetap diakui tetap bagian dari keluarga besar Muhammadiyah, karena sempat sekolah di bangku pendidikan Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, namun keterlibatannya di perkaderan formal Muhammadiyah diragukan sejumlah kalangan. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah pun berulang-kali menegaskan bahwa satu-satunya Calon DPD dari Muhammadiyah hanyalah Syaiful Saleh. Hal ini terlihat misalnya dalam Rakor Kebangsaan yang digelar Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel di Kampus Unismuh Makassar, 12 Januari 2019. Ketua PW Muhammadiyah Sulsel Prof Ambo

Asse bahkan menegaskan tidak taat pada rekomendasi Muhammadiyah dapat dikategorikan sebagai tindakan pengkhianatan. "Surat rekomendasi itu dimulai dengan surah al-Anfal ayat 27 yang berbicara amanah. Karena itu amanah. Kalau amanah tidak ditunaikan, berarti mengkhianati Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan," tegas Ambo Asse (Khittah.co, diakses 15 Desember 2019). Sejumlah pendukung Iqbal Parewangi yang berasal dari warga Muhammadiyah, berpandangan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah bertentangan dengan Khittah Perjuangan Muhammadiyah, yang menyatakan bahwa Muhammadiyah bergerak di ranah *high politic* (politik adiluhung, atau politik nilai), bukan *real politic* (politik praktis). Menurut mereka, seharusnya Muhammadiyah tidak usah mengeluarkan rekomendasi, dan menyerahkan pilihan politik itu pada sikap personal warga persyarikatan.

Pandangan moderat disampaikan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel Andi Iskandar Tompo. Ia menyatakan bahwa kader Muhammadiyah yang tidak menaati rekomendasi Pimpinan Wilayah, tidak akan memperoleh sanksi. Alasannya, sulit membuktikan perbedaan pilihan tersebut. Selain itu, sanksi semacam itu akan melahirkan konflik yang menyebabkan perpecahan di internal persyarikatan (Wawancara, 12 Desember 2019).

Pada tanggal 27 April 2019, optimisme kemenangan Syaiful Saleh terasa dalam percakapan grup media perpesanan *Whats App*. Optimisme itu cukup beresalan, laporan perolehan suara dari berbagai TPS cukup menggembirakan. Apalagi sepekan sebelum hari H Pemilu, beredar hasil survei yang menempatkan elektabilitas Syaiful Saleh berada di urutan keempat diantara calon anggota DPD lainnya. Meski demikian, Tim Basis tidak memiliki saksi yang merata di semua TPS, akibatnya tidak semua suara Syaiful Saleh dapat dikawal secara maksimal. Optimisme Tim Basis atas kemenangan Syaiful Saleh sempat bertahan sepekan sesudah Pemilu. Setelah data semua daerah hampir rampung. Rekapitulasi resmi KPU pun menempatkan Calon DPD nomor urut 33 berada di posisi kelima dengan perolehan sebesar 360.495 suara, terpaut lebih dari 60 ribu suara dibanding urutan keempat Ajiep Padindang yang meraup 427.005. Suara Syaiful Saleh mengungguli Iqbal Parewangi yang memperoleh 286.411 suara (pemilu.antarnews.com, diakses 15 Desember 2019).

Gagalnya Syaiful Saleh dan Iqbal Parewangi dianggap sejumlah kader Muhammadiyah sebagai pengulangan kegagalan akibat pecahnya suara Muhammadiyah. Namun hal tersebut dibantah salah seorang Tim Basis, Ahmad. Menurutnya, jika dianggap suara Muhammadiyah solid pada tahun 2014, pemilih Iqbal Parewangi saat itu sebesar 233.785 suara. Sementara suara pada Pemilu 2019, Syaiful Saleh meraup 360.495 suara, dan Iqbal Parewangi 286.411 suara. Ahmad berpendapat, bukan suara Muhammadiyah yang pecah, melainkan Calon DPD lain yang pergerakannya lebih terstruktur dan masif (Wawancara 20 Desember 2019).

4. Pembahasan

Domain politik hanyalah salah satu wajah, dari sekian banyak wajah Muhammadiyah. Misalnya yang dirumuskan Alfian (1989), Muhammadiyah memiliki tiga wajah, yaitu sebagai pembaharu keagamaan (*a religious reformist*), agen perubahan social (*agent of social changes*), serta sebagai kekuatan politik (*a political force*). Artikulasinya, sebagai pembaharu keagamaan, Gerakan

Muhammadiyah berwujud sebagai gerakan pemurnian agama Islam. Wujud kiprah sebagai agen perubahan sosial, ditunjukkan dalam bentuk modernisasi sosial melalui jalur pendidikan. Terakhir, Muhammadiyah juga tampil sebagai kekuatan politik yang cakap memainkan perannya.

Namun politik yang diharapkan bisa dijadikan jalan keluar dari berbagai macam masalah krusial yang dihadapi bangsa ini justru telah menjelma menjadi sumber masalah. Logika politik Lasswell “*who gets what, when and how*” semakin meluas, bahkan pikiran Machiavellian semakin berkembang masif. Politik hanya menjadi alat tukar kepentingan dan rebutan kursi kekuasaan. Karena politik Lasswellian yang pragmatis dan Machiavellian yang menghalalkan segala cara itulah yang membuat banyak warga Muhammadiyah terkesan menjauh dari politik.

Menurut Nashir (dalam Mubarak, 2012), ada beberapa pola relasi antara Muhammadiyah dan politik. *Pertama*, hubungan formal dan langsung. Bersifat formal bermakna bahwa secara organisasi, Muhammadiyah terlibat secara langsung dalam parpol. Kata ‘langsung’ dipahami bahwa Muhammadiyah terlibat aktif dalam menjalankan kegiatan politik yang bertujuan pada perjuangan kekuasaan, atau politik praktis. Misalnya keterlibatan Muhammadiyah dalam Partai Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi), dan Partai Muslim Indonesia (Parmusi). *Kedua*, yaitu pola relasi personal dan tidak langsung. Hal tersebut ditandai dengan keterlibatan aktif para elit pimpinan Muhammadiyah dalam melahirkan parpol. Aktivitas tersebut di sisi lain, juga mendapatkan dukungan masif dari para kader dan simpatisan Muhammadiyah. Misalnya, Amien Rais yang membidani lahirnya PAN. *Ketiga*, pola hubungan yang bersifat netral. Dalam pola ini, relasi Muhammadiyah dengan politik lebih tegas, dengan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis serta menjaga jarak sama kepada semua partai politik.

Kini, pola hubungan yang menjadi garis kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, tampaknya lebih dekat ke pola hubungan yang ketiga. Meski harus diberi catatan, bahwa polanya bukan lagi ‘menjaga jarak yang sama’, melainkan ‘menjaga kedekatan yang sama’ dengan semua partai politik. Meski demikian, sikap ini tidak lantas membuat Muhammadiyah tidak diperhitungkan dalam pentas politik. Buktinya, hampir setiap pemerintahan di era reformasi selalu memberikan ‘jatah kursi’ kabinet untuk Muhammadiyah, meski organisasi ini tidak pernah meminta. Model peranan seperti ini pernah diuraikan Mayer, N. Z dan John, D. M (2017), dimana keterlibatan organisasi keagamaan dalam pemerintahan merupakan bagian dari upaya pencerahan kebijakan. Bahkan dalam pandangan Gunning, J dan Jackson, R (2011), pelibatan jaringan keagamaan dalam dimensi politik merupakan hal yang vital demi kepentingan lokal dan global, karena dapat berfungsi sebagai alat perdamaian dalam masyarakat.

5. Kesimpulan

Secara normatif, sikap politik Muhammadiyah dalam berbagai kontestasi relatif sama, yaitu bersikap netral. Namun netralitas itupun memiliki penafsiran beragam, ada netralitas pasif dan aktif. Netralitas pasif yang dikenal dengan semboyan ‘menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik’ dikritik karena terkesan Muhammadiyah anti-politik. Sebaliknya, netralitas aktif, yang mengusung slogan ‘menjaga kedekatan yang sama dengan semua partai politik’ juga masih menyimpan sejumlah persoalan. Dilema yang dihadapi, bagaimana

operasionalisasi sikap netral sekaligus aktif, tidak berpihak pada kekuatan politik tertentu, namun aktif menyuarakan nilai-nilai politik adiluhung.

Dalam konteks Pemilihan Presiden 2019, sikap netral Muhammadiyah kadang dipojokkan sebagai sikap pembiaran terhadap kezaliman, oleh pendukung Capres tertentu yang berupaya mendorong Muhammadiyah terlibat aktif dalam aktivitas dukung mendukung Capres tertentu. Sikap 'netralitas aktif' Muhammadiyah dengan mendorong berbagai rekomendasi kebijakan terhadap para Capres juga dianggap sikap mubazir, membuang energi percuma, karena lazimnya para pemenang hanya menjalankan rekomendasi para pendukungnya. Namun meski dikritik demikian, PP Muhammadiyah tetap berpijak pada rel netralitas dalam Pemilu 2019. Para pengurus PP Muhammadiyah yang terlibat sebagai tim sukses dinonaktifkan sementara. Sementara di akar rumput, termasuk di kalangan warga Muhammadiyah di Sulawesi Selatan, cara pandang PP Muhammadiyah yang menganggap politik sekadar urusan taktis dan strategis, dikritik karena bagi sebagian besar aktivis Muhammadiyah di wilayah ini, politik adalah sikap ideologis. Meski tak menggunakan nama organisasi, namun para aktivis Muhammadiyah di tingkat wilayah maupun daerah, menunjukkan simpati ke pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Sandiaga, karena dianggap sebagai representasi aspirasi politik Islam. Meskipun Cawapres Jokowi adalah K. H. Ma'ruf Amin yang merupakan Ketua MUI, namun kehadirannya lebih dipandang sebagai representasi politik NU.

Cara pandang terhadap Pilpres, juga mempengaruhi pandangan dalam pilihan partai politik. Partai-partai yang mendukung Jokowi, khususnya yang militan membela Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta 2017, juga mendapatkan sikap antipati di kalangan Pimpinan dan warga Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Kehadiran kader-kader Muhammadiyah, di PDIP, Perindo atau PSI misalnya, tidak merubah citra partai tersebut, sebagai partai yang dianggap memusuhi Islam. Di Sulawesi Selatan, Pimpinan Muhammadiyah memaknai 'menjaga kedekatan yang sama dengan semua parpol', ditambahkan dengan 'kecuali partai anti-Islam'.

Hal yang menarik, dalam pemilihan Calon Anggota DPD, Muhammadiyah secara terbuka mengumumkan atau mendeklarasikan calon yang didukungnya di depan publik. Ada cara pandang, yang menganggap keterlibatan Muhammadiyah dalam Pemilihan Calon DPD, bukan aktivitas politik praktis. Politik praktis dimaknai secara terbatas, hanya dalam konteks dukung-mendukung yang melibatkan partai politik, seperti Pilpres maupun Pileg. Rekomendasi Muhammadiyah Sulsel untuk Calon DPD sebenarnya cukup efektif dalam menggerakkan struktur organisasi Muhammadiyah, termasuk organisasi otonom dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Meski demikian, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan juga tidak memberikan sanksi bagi kader yang memiliki pilihan politik berbeda.

Catatan penting lainnya, berbagai ijtihad model relasi Muhammadiyah dan politik tidak lagi sepenuhnya mengandalkan instruksi atau penafsiran dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sejumlah informan, yang merupakan Pimpinan Muhammadiyah maupun Angkatan Muda Muhammadiyah juga mendorong pemberian kewenangan melakukan ijtihad politik pada tingkat lokal kepada pimpinan di masing-masing tingkatan. Sikap 'diam' PP Muhammadiyah atas berbagai ijtihad lokal, misalnya yang dilakukan Muhammadiyah Jawa Timur, Yogyakarta, maupun Sulawesi Selatan, bisa dimaknai sebagai pembenaran atas ijtihad tersebut.

Model ideal relasi Muhammadiyah dan politik masih membutuhkan kajian mendalam dan meluas. Mendalam dimaknai, bahwa penelitian ini masih perlu mengkaji berbagai sikap Muhammadiyah di level lokal dalam mengambil sikap politik, misalnya dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah. Meluas dimaknai, kajian ini masih membutuhkan banyak studi perbandingan dengan daerah-daerah lain. Sehingga, peneliti menyarankan, kajian ini di masa mendatang dapat ditindaklanjuti dengan melakukan riset terhadap model sikap Muhammadiyah dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah. Selain itu, meningkatkan kuantitas kajian perbandingan relasi politik Muhammadiyah dan politik di banyak wilayah dan daerah lain, akan memperkaya perspektif dalam menciptakan model. Model inilah yang dapat dijadikan rujukan bagi PP Muhammadiyah dalam merumuskan Ijtihad Politik ataupun Khittah Perjuangan Muhammadiyah yang kontekstual dengan perkembangan zaman.

Daftar Pustaka

- Alfian. (1989). *Muhammadiyah: The Political Behavior Of A Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Bosra, M. (2008). *Tuang Guru, Anrong Guru dan Daeng Guru: Gerakan Islam di Sulawesi Selatan 1914-1942*. Makassar: La Galigo Press.
- Burhani, A. N. (2019). Opini Kompas: *Muhammadiyah di Tahun Politik*. Jakarta, Kompas: 25 Januari 2019.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. Terjemahan Achmad Fawaid dan Rinayanti Kusmini. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatmawati. (2014). *Perilaku Politik Elit Muhammadiyah Pasca Orde Baru di Makassar (1999-2004)*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Gunning, J., & Jackson, R. (2011). *What's so 'religious' about 'religious terrorism'?*. *Critical Studies on Terrorism*, 4(3), 369-388. Doi: <https://doi.org/10.1080/17539153.2011.623405>.
- John, D. M., & Mayer, N. Z. (1977). *Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory*. In *Social movements in an organizational society* (pp. 15-42). Routledge.
- Jurdi, S. (2010). *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maarif, A. S. "Muhammadiyah dan High Politics" dalam jurnal *Ulumul Qur'an*, No.2, Vol.VI, 1995.
- Nashir, H. (2008). *Khittah Muhammadiyah Tentang Politik*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Qadir, Z., Nurmandi A., & Yamin M. N. (2015). *Muhammadiyah dan Negara: Arah Pemikiran dan Gerakan Abad Kedua*, dalam *Ijtihad Politik Muhammadiyah: Politik sebagai Amal Usaha* (Editor: Zuly Qadir dkk). Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2015.
- Sholikin, A. (2018). *Perbedaan Sikap Politik Elektoral Muhammadiyah Antara Pusat Dan Daerah*. *Jurnal Polinter*, Vol. 3 No. 2. Jakarta, Program Studi Ilmu

Politik Universitas 17 Agustus 1945. Doi:
<https://doi.org/10.52447/polinter.v3i2.1080>

Suratman. (2017) *Elit Muhammadiyah dalam Politik (Studi Kasus: Kemenangan A. M. Iqbal Parewangi Sebagai Anggota DPD RI Pada Pemilu 2014)*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Syaifullah. (1997). *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Syamduddin, M. Din. (1995). "The Muhammadiyah Da'wah and Allocative Politics In The New Order." *Studia Islamika* 2 (2): 35–71.

Taba, A. A. (1996). *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press; 1996.

Tebba, S. (1993). *Islam Orde Baru: Perubahan Politik dan Kenegaraan*. Yogyakarta: Tiara Wacana; 1993.

Yin, RK. (1996). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Terjemahan, M. Djauzi Mudzakir. Jakarta: RajaGrafindo Persada.